

**PELAKSANAAN FUNGSI LKMD DALAM WILAYAH KECAMATAN
SUKAMAJU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU**



OLEH
BOSOWA

TAHMIL

4587021080 / 881130842

Diajukan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Negara

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG
1995

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas "45" Ujung Pandang, tersebut di bawah ini :

Nama : T A H M I L

Nomor Stambuk : 4587021080

Nirm : 881130842

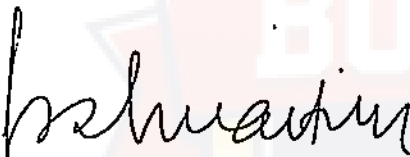
Program Studi : Ilmu Administrasi

Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN FUNGSI LKMD DALAM
WILAYAH KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU.

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

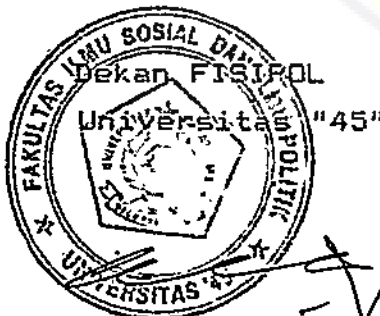


Drs. H. PS. Rahim, MS.



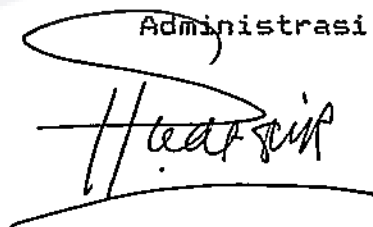
Drs. Guntur Karnaeni

Mengesahkan :



Drs. Guntur Karnaeni
Nip. 130 693 281

Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Negara



Drs. M. Natsir Tompo
Nik. D. 45 00 39

HALAMAN PENERIMAAN


Pada Hari Sabtu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima. Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN FUNGSI LKMD DALAM WILAYAH KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU.

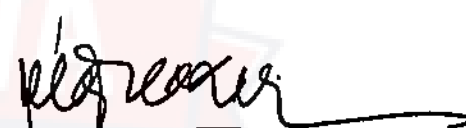
Nama : T A H M I L
Nomor Stb / Nirm : 4587021080 / 881130842
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas "45" Ujung Pandang.




PENGAWAS UMUM


(Dr. Andi Jaya Soe, S.E. MBA)
Rektor Universitas "45"


(Prof. Dr. H. Mappa Nasrum, M.A.)
Dekan Fisipol Unhas



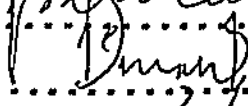
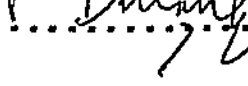
PANITIA UJIAN


(Drs. Guntur Karnaeni)
Ketua


(Drs. Suparman Mekkah)
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
2. Drs. A. Gau Kadir, MS
3. Drs. H.P.S. Rahim, MS
4. Drs. Suparman Mekkah


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Fuji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena hanya dengan limpahan rahmat dan Magfirah-Nyalah, sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam kegiatan penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, baik karena keterbatasan materi maupun karena kemampuan tehknis penulis yaang masih kurang. Namun demikian semuanya dapat diatasi berkat adanya bantuan dari semua pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis berkehan menyampaikan ucapan terima kasih :

1. Bapak Prof. DR. MR. H. A. Zainal Abidin Farid, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, selaku Dekan Fisipol Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Mohammad Thala, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisipol "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Drs. H. PS. Rahim, MS. selaku Konsultan I dan Bapak Drs. Guntur Karnaeni selaku Konsultan II yang secara langsung memberikan bimbingan kepada penulis skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen/karyawan dalam lingkungan Fisipol "45" Ujung Pandang.
6. Bapak Kepala Pemerintah Kecamatan Sukamaju yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh rekan-rekan sahabat, Ir. Ikhwan Sulle, Ir. Hariadi, Ir. Theo Siraid, Ir. M. Hardoyo, dan Fajar Muhammad Alam yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya secara istimewa saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan, yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta yang telah setia dan iklas membesarkan mendidik dan membiayai penulis, hingga dapat menyelesaikan study. Dan begitu pula kepada seluruh keluargaku utamanya kak. Nurliah Kaharuddin, Kak. Rullah, Kak. Rahmawati yang telah penuh pengertian memberikan dorongan baik materil maupun moril.

Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua, amin!

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB. I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metodologi Penelitian	6
E. Sistematikan Pembahasan	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi	
L K M D	11
B. Partisipasi Masyarakat Dalam	
Pembangunan	23
C. Pembangunan Desa, Dasar dan Tujuan-	
nya.....	26
BAB. III. GAMBARAN UMUM LOKASI KECAMATAN	
SUKAMAJU	31
A. Selayang Pandang Kecamatan Sukamau.	31
B. Keadaan Geografis	32
C. Struktur Organisasi	36

BAB. VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Fungsi LKMD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pem- angunan Desa	43
B. Pelaksanaan Fungsi LKMD sebagai Wadah Membina dan Menggerakkan Potensi Pemuda untuk membangun.....	61
C. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat	67
BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
No. 01. Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin Dan Desa/Kelurahan	34
02. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Sukamaju	35
03. Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan LKMD Mengaktifkan Masyarakat Dalam Pembangunan	50
04. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi LKMD Dalam Perencanaan Pembangunan.	54
05. Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan LKMD Menggerakkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	55
06. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi LKMD Dalam Pembiayaan Pembangunan Desa	57
07. Hasil Pembangunan Fisik Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	59
08. Hasil Kegiatan LKMD Berupa Pembangunan Non Fisik Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	60
09. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi LKMD Dalam Membina dan Menggerakkan Potensi Pemuda Dalam Membangun	64
10. Hasil Kegiatan Lembaga Ketahanan Desa Dalam Usaha Membina Potensi Pemuda-Pemuda Untuk Membangun	66
11. Pendapat Responden Terhadap Faktor-Faktor Pendorong pelaksanaan Fungsi LKMD Sebagai Wadah Partisipasi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan dan Sebagai Wadah Membina dan Menggerakkan Potensi Pemuda Untuk Membangun	68
12. Pendapat Responden Terhadap Faktor-Faktor yang Dapat Menghambat Pelaksanaan Fungsi LKMD sebagai Pembangunan Desa Sebagai Wadah Membina dan Menggerakkan Pemuda Untuk Membangun	69

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap, dimana tujuan setiap tahap pembangunan, bermaksud meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dengan tujuan pembangunan itu, maka dalam setiap tahap pembangunan diusahakan agar masyarakat segera memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yaitu berupa kesejahteraan lahir dan batin.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk dapat berkembang atas kekuatan sendiri, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk itu, maka pemerintah telah melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan perkapita seluruh rakyat Indonesia.

Salah, satu faktor penentu terciptanya pembangunan Nasional, adalah mengarahkan swadaya masyarakat ke arah pembangunan tepat guna dan berdaya guna, terutama di daerah pedesaan.

Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur di perlukan waktu yang cukup lama dan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan dari REPELITA yang satu ke REPELITA yang lain. Secara operasional, tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam bentuk pola dasar pembangunan Nasional sebagai berikut :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila sebagai wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dengan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, merata tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai".

Berdasarkan dengan perumusan tersebut di atas, maka tergambar dengan jelas bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam pembangunan manusia seutuhnya yang mengacu pada pembangunan dari rakyat untuk rakyat.

Dilain hal dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara di jelaskan bahwa pembangunan dewasa ini diprioritaskan kedaerah pedesaan, oleh karena sebagian besar masyarakat Indonesia berdiam di daerah pedesaan yang merupakan titik sentral pembangunan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat langsung merasakan manfaat pembangunan secara nyata.

Pembangunan yang mapan di daerah pedesaan akan dapat dicapai apabila didukung oleh beberapa faktor, seperti :

1. Pemerintah Desa
2. Partisipasi masyarakat
3. Perencanaan yang mantap.
4. Pembiayaan.

Dengan keempat fakta tersebut di atas merupakan salah satu prioritas fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah peran sertanya didalam memberikan kaderisasi pelanjut tongkat estapet kepemimpinan baik didaerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Pengkaderisasian yang digalakan oleh Lembaga Ketahanan masyarakat Desa di pokuskan kepada pemuda-pemuda desa, dengan harapan akan menjadi mitra pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang yang ada di daerah pedesaan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu. Namun peran serta pemuda-pemudi pedesaan di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, di bidang pembangunan, sungguh sangat mengecewakan.

Dengan demikian, maka peneliti menfokuskan perhatiannya pada bidang pembinaan pemuda pedesaan di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu. Hal ini merupakan salah satu fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang harus sejalan dengan beberapa fungsinya yang lain.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Suatu hal yang tidak mungkin dihindari lagi dalam proses kehidupan manusia adalah manusia selalu diperhadapkan keaneka-ragaman masalah yang dihadapi dimasa lampau dan pada saat sekarang ada kemungkinan akan muncul dimasa yang akan datang. Menurut pendapat seorang pakar Ilmu-ilmu Sosial Dr. Suharsini Arikunto mengatakan :

"Masalah, mesti merupakan bagian dari kebutuhan seseorang, yang dipecahkan. Hal ini merupakan gambaran yang jelas bahwa yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan adalah sangat penting" (1985 : 21).

Untuk melaksanakan fungsi LKMD di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu khususnya di wilayah Kecamatan Sukamaju maka perlu adanya sistem pembangunan manusia seutuhnya agar pelaksanaan fungsi LKMD dapat berjalan dengan baik.

Mengingat penting masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi LKMD di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu maka perlu adanya pemecahan masalah dan berusaha mencegah timbulnya kemungkinan besar dapat memperlambat sistem pelaksanaan fungsi LKMD yang telah direncanakan.

Atas dasar tersebut di atas, maka penulisan skripsi ini, masalah-masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa?
- b. Bagaimana pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun ?
- c. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dan sebagai pembina dan penggerak potensi pemuda untuk membangun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini adalah dimaksudkan :

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun.

c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, dan usaha membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun.

2. Kegunaan Penelitian .

Penelitian dan penulisan skripsi ini adalah diharapkan berguna :

- a. Sebagai salah satu bahan informasi mengenai upaya peningkatan peranan LKMD dalam pembangunan desa.
- b. Sebagai sarana bagi penulis dalam upaya memperluas pengetahuan tentang aspek-aspek pelaksanaan pembangunan desa khususnya.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah di dasarkan pada metode "deskriptif" yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh secara umum terhadap akumulasi data dasar.

2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah

Tingkat II Luwu yang berjumlah 15.960 orang dan jumlah kepala keluarga berjumlah 1.680 orang.

b. Sampel

Sampel penelitian ini adalah diambil dari atau dipilih sebanyak 5% responden dari seluruh rumah tangga dan kepala keluarga yang ada. Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 84 orang, yang meliputi :

- Pegawai Negeri sebanyak = 12 orang
 - Pegawai dan Wiraswasta sebanyak = 40 orang
 - Remaja/pemuda sebanyak = 32 orang
-
- Jumlah = 84 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab kepada responden yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukah dengan mempergunakan pedoman wawancara dengan responden yang diteliti adalah sebanyak 84 orang.

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui study kepustakaan tentang hasil penelitian yang sama dengan penelitian

iniseperti dokumen-dokumen tertulis, karya ilmiah yang relevan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel frekuensi atau prosentase,

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penulis skripsi, disajikan dalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, dikemukakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, dikemukakan tinjauan pustaka yang meliputi pengertian, kedudukan dan fungsi LKMD, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dasar dan tujuannya.

Bab ketiga, dikemukakan gambaran umum lokasi penelitian, selayang pandang Kecamatan Sukamaju, Keadaan Geografis, Struktur Organisasi.

Bab Keempat, dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, fungsi LKMD sebagai wadah membina dan menggerakkan potensi Pemuda untuk membangun, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat.

Bab kelima, dikemukakan kesimpulan dan saran-saran yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan penutup dari penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Kedudukan Fungsi LKMD

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, khususnya di daerah pedesaan, maka salah satu wadah yang menentukan ialah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), lembaga ini adalah penjelmaan dari Lembaga Sosial Desa (LSD) yang ada sebelumnya. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980, Lembaga Sosial Desa (LSD) ditingkatkan fungsinya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), agar hasilnya dapat lebih meningkat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah badan atau organisasi masyarakat dari dan untuk mengadakan kerjasama serta bermusyawarah guna merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa tersebut.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), maka dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa menuju kejayaan bangsa dan negara. Bentuk dan wujudnya adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara.

- b. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah organisasi pemerintahan camat bahkan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi terendah dan langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, yang dihubungkan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 maka yang dimaksud dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berdasarkan Keputusan Presiden ini adalah sebagai berikut :

"Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kegiatan dan kehidupan serta penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan dan keamanan". (Kepres No. 28 : 1980 : 2).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka jelas bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan salah satu lembaga yang sangat penting artinya dalam pembangunan khususnya di wilayah pedesaan.

Seperti telah diketahui pula bahwa pada dasarnya usaha pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tujuan pokok pembangunan yang ditujukan kepada tercapainya kesejahteraan lahir batin bagi seluruh masyarakat sehingga guna merealisasikan tujuan tersebut, masyarakat desa tidak hanya sebagai obyek atau sasaran pembangunan, akan tetapi juga sekaligus menjadi subyek pembangunan. Untuk itu maka pembangunan desa harus didasarkan pada usaha peningkatan swadaya masyarakat sebagai faktor utama dalam melaksanakan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat, kewajiban pemerintah disini adalah menyediakan sarana-sarana dan prasarana, memberikan imbalan dan pengawasan dan fasilitas yang diperlukan sedangkan selebihnya didasarkan pada kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena pembangunan harus merupakan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Maka sudah barang tentu bahwa didalam memadukan atau mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat, perlu adanya sarana yang digunakan untuk mencapai maksud tersebut, sarana ini adalah wadah partisipasi masyarakat dalam rangka ikut mendarmabaktikan diri kedalam proses pembangunan. Wadah partisipasi masyarakat itu hendaknya dapat menampung

dan melaksanakan aspirasi masyarakat, maupun inisiatif atau prasarana yang tumbuh/liar dari masyarakat. Wadah yang dimaksud tidak lain adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Wadah ini diharapkan dapat melaksanakan berbagai fungsi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan untuk terwujudnya sasaran yang diharapkan, terutama dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dalam wilayahnya masing-masing. Selain menjadi wadah partisipasi masyarakat juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi yang merupakan tugas dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah diharapkan untuk mampu memacu pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, yang dalam menjalankan tugas-tugasnya didukung oleh partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri.

Adapun kedudukan dan susunan organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), telah diatur dalam keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 pasal 3 dan 4 sebagai berikut :

"Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berkedudukan baik di desa maupun di kelurahan dan merupakan suatu lembaga masyarakat yang berifat lokal dan seara organisasi berdiri sendiri. Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa atau kelurahan setempat. Susunan organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Ketua umum, yang dijabat oleh Kepala Desa/kelurahan.
- b. Ketua I
- c. Ketua II
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan".
(Bayu Suryaningrat : 1980 : 448-449)

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dibentuk setiap desa/kelurahan, adalah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berkedudukan di desa/kelurahan dan beridri sendiri, tidak ada kaitan antar satu LKMD dan LKMD di desa/kelurahan lain, hanyalah hubungan kerja sama yang tidak mengikat secara organisasi. Disamping itu juga tidak ada LKMD ditingkat kecamatan yang dapat mempersatukan LKMD dalam kecamatan yang bersangkutan.

Susunan organisasi Lembaga Ketahanan masyarakat Desa (LKMD) yang bersifat fungsional, yang dimaksud untuk melancarkan tugas-tugas kepala desa/lurah maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan menjadi partner pemerintah desa/lurah dalam pembinaan masyarakat desa. Karena itu maka ketua umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) harus dijabat oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat dan para generasi mudanya.

Dari perpaduan antara perangkat desa/kelurahan dengan segenap lapisan masyarakat desa/kelurahan dalam wadah LKMD, diharapkan akan dapat mewujudkan ketahanan masyarakat dipedesaan dalam hal ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan keamanan rakyat dari segala ancaman, gangguan, dan rongrongan, baik yang datang dari dalam desa/kelurahan maupun dari luar.

Tugas pokok dari fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah membantu Kepala Desa/kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan atau musyawarah, menggerak dan meningkatkan prakarsa partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara terpadu melalui gotong royong, dan menumbuhkan suatu kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa/kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi LKMD tersebut, maka dibagi kedalam sembilan fungsi sebagai berikut :

"Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- 2) Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- 3) Mengalih, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- 4) Sebagai sarana telekomunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara warga da masyarakat itu sendiri.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
- 6) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun.
- 7) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- 8) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk membangun.

- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap". (Bayu Suryaningrat : 1980 : 449-450).

Dari kesembilan fungsi LKMD tersebut diatas maka dijelaskan dalam uraian-uraian paragraf-paragraf berikut ini :

1. Fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan melaksanakan pembangunan desa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai wadah yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di pedesaan, berfungsi untuk membantu kepala desa/kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, yang didasarkan atas asas musyawarah dan gotong royongan. Untuk itu LKMD sebagai wadah pemersatu partisipasi masyarakat, harus tampil sebagai motor penggerak pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut, maka LKMD menghimpun pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di tingkat desa/kelurahan, pemuka-pemuka dari golongan agama dan adat, generasi muda yang terdiri dari pemuda, pelajar dan mahasiswa serta cendekiawan yang berdomisili di desa/kelurahan yang bersangkutan, dan tokoh-tokoh kaum wanita dan sebagainya, kesemuanya itu dipersatukan dalam LKMD untuk merumuskan perencanaan dan selanjutnya

melaksanakan pembangunan desa yang didasarkan atas dasar musyawarah.

2. Fungsi LKMD dalam Memasyarakatkan P-4

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berfungsi untuk membantu pemerintah desa/kelurahan dalam mengamalkan pengertian pengamalan Pancasila bagi setiap warga masyarakat desa/kelurahan, agar mereka menerapkan dalam kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan pergaulan masyarakat.

Fungsi LKMD dalam hal ini adalah mengharuskan kepada setiap anggotanya menjadi kader dan pelopor didalam penghayatan dan pengamalan Pancasila, baik sebagai dasar ideologi negara maupun sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu para anggota LKMD harus berupaya melaksanakan fungsi tersebut, agar menjadi panutan bagi warga masyarakat desa dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Fungsi LKMD dalam bentuk Swadaya Gotong Royong

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berfungsi untuk menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan. Untuk menggali dan memanfaatkan potensi desa dengan sebaik-baiknya, maka LKMD sebagai wadah yang berfungsi untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam hal tersebut, harus tampil sebagai

pelopor untuk memupuk swadaya dan gotong-royong masyarakat di pedesaan.

Sebagai mana dikemukakan bahwa Desa/Kelurahan memiliki sumber daya alam seperti lahan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan perhubungan serta aneka bahan galian dan sebagainya, perlu digali dan dimanfaatkan. Untuk maksud tersebut, diharapkan LKMD sebagai wadah pemererasatu, masyarakat desa dapat berfungsi untuk menggerakkan sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi para petani, petambak, peladang, peternakan, nelayan, pengerjajian, karyawan, buruh, pegawai dan sebagainya.

4. Fungsi LKMD sebagai Sarana Komunikasi Pedesaan

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berfungsi untuk menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dan antara masyarakat itu sendiri dalam lingkungan pergaulan sehari-hari. Perwujudan fungsi ini tercermin dalam kanggotaan LKMD yang terdiri berbagai golongan dan lapisan masyarakat desa/kelurahan.

Para anggota LKMD tersebut disamping dapat melakukan musyawarah dan mufakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, juga dapat berfungsi selaku pembina dan penyuluh musyawarah, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintahan dan pembangunan desa/kelurahan. Dengan

demikian telah tercipta komunikasi dua arah yakni antar pemerintah dan masyarakat dn sebaliknya, serta antar masyarakat itu sendiri.

5. Fungsi LKMD dalam Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa/Kelurahan, karena melalui wadah ini warga desa dapat menambah pengetahuan secara informal bagi mereka. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan itu, dapat saja diperoleh pada berbagai bidang pengetahuan yang sifatnya praktis seperti ide-ide baru, pengenalan politik, asimilasi dibidang sosial, pengetahuan ekonomi dan koperasi, ketrampilan teknologi tepat guna dan sebagainya.

LKMD sebagai wadah pemersatu warga desa/kelurahan, dapat saja melakukan kegiatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan dan ketrampilan warga desanya, dengan cara menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk menunjang kegiatan dan programnya. Dengan demikian maka LKMD telah berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat desa.

6. Fungsi LKMD dalam Pembinaan dan Menggerakkan potensi Pemuda Untuk Membangun.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selaku wadah pembina generasi muda, lebih banyak melibatkan

pemuda dalam keanggotaannya. Mereka itu diharapkan untuk menjadi pembina dan penggerak potensi pemuda disetiap sektor pembangunan pedesaan, agar para pemuda itu dapat menyalurkan minat dan bakatnya masing-masing.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka LKMD tampil sebagai pemersatu, membina para remaja di desa/kelurahan khususnya mereka yang putus sekolah, agar dapat menambah pengetahuannya serta meningkatkan ketrampilan yang dimilikinya, dengan cara mengarahkan mereka untuk diikuti sertakan dalam berbagai program latihan dan pendidikan menurut minat dan bakat yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan para remaja dari perbuatan yang kurang terpuji, sehingga tenaga dan pikirannya selaku generasi pelanjut pembangunan.

7. Fungsi LKMD dalam Peningkatan Peranan Wanita

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, dalam hal ini para pengurus LKMD harus tampil sebagai pelopor peningkatan peranan wanita dalam mewujudkan Norma Keluarga Sejahtera (NKKBS). Untuk mewujudkan program tersebut dapat dilakukan dengan cara membantu para petugas Keluarga Berencana melaksanakan pembinaan dan penyuluhan KB.

Pelaksanaan Fungsi LKMD tersebut dapat di tunjang dengan memprakarsai pembentukan Posyandu, yang dapat memberikan pelayanan yang terpadu antara pembinaan kesejahteraan anak balita dengan program Keluarga Berencana warga desa pasangan usia subur. Menyebarkan informasi bahwa dua anak sudah cukup, laki-laki atau perempuan sama saja. Dengan demikian diharapkan akan tercipta peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS).

8. Fungsi LKMD dalam Pembinaan Antar Lembaga

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) juga berfungsi untuk membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan desa/kelurahan oleh karena sebagai LKMD satu-satunya wadah tingkat desa yang berfungsi sebagai partner pemerintah desa/kelurahan dalam pembangunan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan fungsi LKMD untuk tampil kedepan menjalin setiap kerja sama dengan lembaga lain, baik yang ada ditingkat desa/kelurahan maupun yang ada ditingkat kecamatan ataukah Kabupaten/kotamadya yang kadang-kadang terjun ke pedesaan membawa misi berbagai bentuk program pembangunan.

Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi seperti, kerjasama LKMD dengan mahasiswa

kerja nyata, ABRI Masuk Desa, Safari Masuk Desa, kesehatan, Safari Pasca Panen, Penyuluhan Supra Insus, penyuluhan dan pelatihan industri kecil, Poskamling, Posyandu, pembinaan kesejahteraan keluarga, pembinaan karang taruna dan palang merah remaja, remaja mesjid, kelompokcapir dan sebagainya. Kesemuanya itu menjadi sasaran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk menjalin kerja sama antar lembaga, guna mempercepat proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.

9. Fungsi LKMD dalam Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) juga berfungsi membantu melaksanakan tugas-tugas lain bagi kepala desa/kelurahan untuk menciptakan ketahanan desa yang mantap dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan rakyat semesta.

Adapun fungsi LKMD dalam membantu pemerintah desa atau kelurahan dibidang pembinaan ideologi yaitu melalui kemasyarakatan P-4. Dibidang politik yaitu melalui pengkaderan pemuda dalam Golongan Karya, dibidang ekonomi yaitu melalui wadah koperasi, dibidang sosial budaya yaitu melalui pembinaan norma-norma hukum pemahaman agama, pelestarian adat dan budaya, kesenian, pembinaan olah raga dan sebagainya.

Fungsi LKMD tersebut hanya bersifat membantu kelancaran tugas-tugas kepala desa/lurah, dan bukan sebagai pelaksana sepenuhnya dalam setiap kegiatan yang disebutkan diatas. Karena Kepala Desa/Lurah yang merupakan penguasa tertinggi di desa/Kelurahan memiliki tugas-tugas yang cukup padat, sehingga memerlukan bantuan dari lain khususnya dari anggota LKMD di desa/kelurahan, yang disesuaikan dengan bakat dan minat para anggota LKMD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Melalui wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan, diharapkan dapat mempersatukan aspirasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan. Memberi masukan/tanggapan warga masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dapat menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini dapat mempercepat proses tercapainya tujuan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya yang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat baik di pedesaan maupun diperkotaan.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam membicarakan tentang partisipasi masyarakat dalam kaitannya dalam wadah penunjang pembangunan di daerah pedesaan, maka yang dituju adalah bagaimana keikutsertaan masyarakat desa tersebut dalam kegiatan poses penyelenggaraan pembangunan desa senantiasa

dituntut adanya kesadaran yang sungguh dari kalangan masyarakat, agar dalam keikutsertaannya membuat hasil yang sesuai apa yang diinginkan.

Dengan terbatasnya dana/biaya, maka sangat penting diperhatikan kesadaran masyarakat untuk ikut sert bersama-sama pemerintah didalam menutupi kekurangan-kekurangannya yang ada baik secara materil maupun secara non materil.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan swadaya masyarakat atau partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan :

- "Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendir mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat".
(Undang-undang Nomor 5 : 1979 : 13).

Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo, mengemukakan suatu pengertian bahwa :

- "Suatu kegiatan kemasyarakatan yang dapat diselenggarakan atas dasar kesukarelaan, tetapi juga sering kali karena pola kekuasaan dan iklim tradisional kemasyarakatan dipakai juga sebagai alat mobilisasi, yaitu Gotong-Royong".
(Bintoro Tjokroamidjojo : 1986 : 13).

Pada dasarnya gotong royong tersebut adalah berdasarkan kesukarelaan, saling membantu bekerja untuk suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan sebagian anggota masyarakat atau seluruh masyarakat tertentu.

Dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka menurut Bintaro Tjokroamidjojo terdapat 4 aspek penting yaitu : (Bintaro Tjokroamidjojo : 1986 : 222-224).

1. Terlibat dan ikut serta rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan yang terutama cara-cara mencapai tujuan yang sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung dari sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintah yang berlaku. Misalnya saja menggerakkan tenaga kerja untuk bekerja secara sementara waktu pada kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang bersifat pembangunan.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

C. Pembangunan Desa, Dasar dan Tujuannya

Sebelum memasuki pembahasan mengenai tujuan pembangunan desa, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan batasan arti dari pembangunan itu sendiri.

Menurut S.P. Siagian, mengatakan bahwa :

"Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".
(S.P. Siagian : 1982 : 3).

Sedangkan Michael P. Todang, mengatakan sebagai berikut :

"Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan GNP perkapital sebagai indeks dari pembangunan. Akan tetapi pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang meliputi pula perorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat".
(Michael P. Todang : 1983 : 9).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan :

- a. Suatu usaha pertumbuhan dan pembangunan
- b. Suatu usaha yang secara sadar dan berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa.
- c. Suatu proses yang multi dimensi.
- d. Suatu usaha menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa pembangunan pada umumnya adalah supaya pertumbuhan dan

perubahan yang secara sadar dan berencana dilakukan oleh suatu bangsa menuju modernisasi dan pembinaan bangsa untuk dapat meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Sedangkan dalam rangka pembangunan desa tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan melalui pemerataan pembangunan.

Sedangkan pembangunan masyarakat menurut Catatan Resmi Pola Gerak Operasional Pembangunan Desa (SK Mendagri No. 42 Tahun 1969) disebutkan sebagai berikut:

"Pembangunan desa adalah pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina secara terus-menerus secara sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha menyeluruh". (SK Mendagri No. 42 : 1969):

Berpangkal pada arti pembangunan dan pembangunan desa tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa ruang lingkup pembangunan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana masyarakat desa sebagai bagian masyarakat Indonesia dapat mencapai tingkat kehidupan yang adil dan makmur.
- b. Keadilan dan kemakmuran masyarakat desa yang meliputi bidang materil dan spritual.
- c. Adanya kesadaran bahwa desa adalah merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, karena itu sangat

perlu diusahakan agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik yaitu melalui usaha pembangunan.

- d. Diusahakan agar pandangan hidup masyarakat desa harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan melihat ruang lingkup pembangunan desa tersebut, maka tujuan pembangunan desa dapat dibedakan atas dua macam, seperti yang dikemukakan oleh I Nyoman Bertha, sebagai berikut :

- "a. Tujuan jangka pendek dari pada pembangunan desa adalah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat (khususnya rakyat pedesaan).
- b. Tujuan jangka panjang dari pembangunan desa adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan seluruh aspirasi nasional Bangsa Indonesia yang menjadi dasar segala kebijaksanaan didalam pengambilan langkah dibidang pembangunan (termasuk pembangunan masyarakat desa), jelas tercakup didalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV".
(I Nyoman Bertha : 1982 : 74).

Dengan mengetahui pembangunan desa tersebut, maka pembangunan desa merupakan kewajiban bangsa Indonesia untuk melaksanakan secara massal dan integral.

Pelaksanaan secara massal ini dimaksud adalah merata keseluruh daerah atau wilayah Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan secara integral dimaksudkan bahwa seluruh komponen-komponen yang tercakup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa berjalan / secara berintegral.

Berbicara mengenai tujuan pembangunan desa maka peranan dan kehidupan desa sangat menentukan kepentingan pembangunan nasional maupun daerah yang kehidupannya sebagai berikut :

a. Desa sebagai kekuatan landasan negara

Desa sebagai kekuatan negara sebagian, kedudukan desa sangat penting dalam rangka pembangunan negara.

b. Daerah pedesaan dalam rangka pembangunan daerah!

Daerah pedesaan dalam rangka pembangunan daerah, pada prinsipnya perkembangan suatu daerah dapat dilihat pada perkembangan daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, masing-masing daerah tersebut memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri serta saling bergantung satu sama lainnya, Daerah pedesaan merupakan sumber tenaga kerja bagi daerah perkotaan. Sedangkan daerah perkotaan merupakan sumber-sumber fasilitas-fasilitas bagi penampungan dan distribusi bagi barang-barang dari desa dan untuk daerah pedesaan.

c. Desa sangat subyek

Konsep tradisional mengenai pembangunan desa mengemukakan pemerintah hanyalah merupakan unsur pembantu yang memberikan bimbingan dan penyuluhan. Sedangkan pembangunan yang sesungguhnya dilaksanakan atas swadaya masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa pembangunan desa, maka dengan itu sendiri yang mengambil inisiatif atau prakarsa dan berperan

secara aktif yang selanjutnya desa pulalah yang harus merencanakan proyek-proyek, mengali sumber-sumber pendapatan dari potensi yang dimiliki.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Selayang Pandang Kecamatan Sukamaju

Nama Sukamaju pertama kali diberikan oleh Dirjen Transmigrasi yaitu Subiyanto. Sukamaju diambil dari dua kata "suka" dan "Maju" dengan pengertian ingin, mau, tekad, kehendak dan tampil kedepan atau pantang mundur dalam hal positif.

Kecamatan Sukamaju dimulai dari unit pemukiman transmigrasi dibuka pada tahun 1970/1971 berdasarkan Surat keputusan penyerahan tanah dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor 45/KDH/1969 pada tanggal 2 Agustus 1969 dengan luas areal pemukiman 7,5 Hektar.

Lokasi pemukiman transmigrasi ini dihuni masyarakat transmigrasi pada tahun 1971 dengan 250 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.212 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah 25 KK (105 jiwa), Daerah Istimewa Yogyakarta 72 KK (369 jiwa), Pulau Bali 75 KK (369 jiwa) dan Jawa Timur 78 KK (406 jiwa).

Adapun kepala-kepala UPT dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tahun 1971, UPT dikepalai oleh Drs. Porba,
2. Tahun 1972, UPT dikepalai oleh Soehadi,
3. Tahun 1973, UPT dikepalai oleh M. Soelaiman,
4. Tahun 1974, UPT dikepalai oleh Suhin Rani,
5. Tahun 1975, UPT dikepalai oleh Soehadi,
6. Tahun 1976-1978, UPT dikepalai oleh Ansar.

Pada tahun 1978, setelah dilakukan penyerahan dari Departemen Transmigrasi kepada Pemda Tingkat II Luwu, maka dikeluarkan SK Bupati tentang Kepala desa yang definitif yang dikepalai oleh M. Natsir Mas'ud. Kemudian pada tahun 1984 M. Natsir Mas'ud digantikan oleh P. Usman sebagai kepala Desa Sukamaju sesuai SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor 197/131/1984 sampai sekarang.

Desa Sukamaju adalah salah satu desa diantara 10 desa yang dimekarkan menjadi Kecamatan Sukamaju pada bulan April tahun 1984 yang pada mulanya masuk dalam wilayah Kecamatan Bone-bone.

Pada saat pemekarannya menjadi Kecamatan Sukamaju, maka pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Transmigrasi yang kemudian diambil alih pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan tepat pada tanggal 1 April 1984 oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan meresmikan Kecamatan Sukamaju dengan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 1983.

B. Keadaan Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Sukamaju adalah merupakan salah satu Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II kabupaten Luwu yang mempunyai letak dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bonebone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masamba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan ...

Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten adalah 85 kilometer dan jarak dengan Ibukota Propinsi adalah 475 kilometer.

Kecamatan Sukamaju dilihat dari segi topografinya adalah terdiri dari tiga daerah utama yaitu :

1. Daratan,
2. Pegunungan,
3. Perairan.

Adapun iklim Kecamatan Sukamaju mempunyai suhu rata-rata 33°C dengan curah hujan rata-rata 2.500 - 3.000 mm pertahun dan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan November sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus.

Keadaan tanah Di Kecamatan Sukamaju pada umumnya tergolong jenis tanah Potsoliz yang berwarna kekuning-kuningan, tanah aluvial, tanah regosal dan tanah gleye yang agak lemah bercampur liat. Lapisan tanah teratas agak ketebalan kira-kira ± 12 cm dan lapisan tanah campuran tanah liat dan pasir ketebalannya adalah ± 25 cm.

2. Keadaan Demografis

Kecamatan Sukamaju mempunyai jumlah penduduk sebanyak 15.960 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

JUMLAH PENDUDUK SESUAI JENIS KELAMIN DAN DESA / KELURAHAN

No. Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1. Lampuawa	809	787	1.596
2. Katulungan	665	811	1.476
3. Kaluku	767	589	1.356
4. Salulemo	726	746	1.472
5. Sukamaju	797	920	1.716
6. Sukadamai	883	953	1.836
7. Mulyerejo	931	789	1.720
8. Sidoharjo	637	717	1.354
9. Wonokerto	782	715	1.497
10. Tulang Sari	978	959	1.937
Jumlah	7.974	7.986	15.960

Sumber : Potensi Perkembangan penduduk Kecamatan Sukamaju, 1993.

Dengan melihat tabel tersebut diatas nampak bahwa jenis kelamin perempuan dengan jenis kelamin laki-laki tidak jauh beda, hanya saja kalkulasi penduduk antara Desa/Kelurahan satu sama lain jumlah bervariasi.

Selanjutnya keadaan penduduk menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

KEADAAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
KECAMATAN SUKAMAJU

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Pegawai Negeri Sipil	896
2.	A B R I	325
3.	Karyawan Swasta	1.354
4.	Petani	2.758
5.	Peternak	1.894
6.	Nelayan	1.431
7.	Pedagang	2.247
8.	Pengrajin	1.532
Jumlah		12.437 orang

Sumber : Data Statistik Kecamatan Sukamaju, 1993

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat dilihat pada umumnya penduduk kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu memiliki mata pencaharian adalah petani dan pedagang dan menyusul adalah peternak, Nelayan, pengrajin sedangkan yang lainnya tersebar pada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta dan ABRI. Jumlah keseluruhan penduduk yang sudah bekerja adalah sebanyak 12.437 jiwa. Adapun penduduk yang berjumlah 3.523 jiwa adalah sebagian masih

mengganggu dan sebagian lagi masih tergolong anak-anak (belum mampu bekerja).

C. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

Sebagaimana diketahui bahwa organisasi pemerintah desa yang ada di Indonesia adalah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tentang pemerintah desa. Dengan demikian desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Sukamaju, termasuk desa Kejuara, tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1979.

Adapun organisasi pemerintah desa adalah meliputi sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Mengkoordinir penyelenggaraan pemerintah dan tugas-tugas pembangunan desa serta bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan desa.

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan kepala desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah desa.

Dalam menjalankan hak, wewenang dan pimpinn pemerintah desa yang dimaksud diatas, maka kepala desa :

- a) Bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat.
- b) Memberikan keterangan pertanggung jawab tersebut kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- c) Kepala desa mewakili desanya didalam dan luar pengadilan.
- d) Apabila dipandang perlu kepala desa dapat menunjuk.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa.

Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Apabila kepala desa berhalangan maka sekretariat desa menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari.

Untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka kepala desa dibantu oleh beberapa aparat desa perangkat desa yang bertugas untuk menyelenggarakan bidang-bidang desa dalam rangka pembangunan desa.

Bidang tersebut terdiri dari :

- Urusan Pemerintahan
- Urusan kesejahteraan Rakyat
- Urusan Pembangunan
- Urusan keuangan
- urusan umum

c. Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa, maka dibantu dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kepala dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati Daerah Tingkat II atas usul kepala desa.

d. Lembaga Musyawarah desa

Lembaga musyawarah desa adalah unsur pemerintahan desa yang partner kepala desa dalam pengambilan keputusan desa.

Sebagai kedudukan tersebut, maka Lembaga Musyawarah Desa (LMD) adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang anggotanya terdiri atas

kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat desa dalam wilayah desa Kejuara.

Organisasi pemerintahan desa tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor 309/IX/1973.

2. Struktur Organisasi LKMD

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan, suatu organisasi yang hanya terdapat di desa atau kelurahan serta secara organisasi merupakan organisasi yang berdiri sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 susunan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Ketua I
- c. Ketua II
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi-seksi
 - (1) Seksi Agama
 - (2) Seksi Pembudayaan dan Pengamalan Pancasila
 - (3) Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - (4) Seksi Pendidikan dan Penerangan
 - (5) Seksi Lingkungan Hidup

(6) Seksi. Pembangunan dan Perekonomian dan Koperasi.

(7) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

(8) Seksi Pemuda, Olah raga dan Kesenian

(9) Seksi Kesejahteraan sosial

(10) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Ketua umum LKMD dijabat oleh kepala desa/lurah karena jabatannya dan tugasnya sebagai pimpinan dan penanggung jawab LKMD, fungsi kesemua kegiatan LKMD, mengadakan koordinasi terhadap seksi-seksi agama, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, keamanan, ketentraman dan ketertiban, seksi penerangan dan pendidikan serta membina pembangunan desa.

Ketua I dijabat oleh tokoh masyarakat dengan tugas membantu ketua umum dalam memimpin serta mengendalikan LKMD. Sedangkan fungsi ketua I adalah mengadakan koordinasi dengan ketua seksi-seksi kesehatan, seksi lingkungan hidup, seksi pembangunan, perekonomian dan koperasi, seksi pemuda olah raga kesenian serta melaksanakan tugas dan fungsi ketua umum kalau berhalangan.

Ketua II dijabat oleh ketua team penggerak PKK, fungsi ketua II adalah memimpin dan mengelolah seksi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan pelaksanaan tugas ketua umum dan ketua I berhalangan.

Tugas sekretaris adalah membantu pimpinan dan menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan pendapatan dan pelaporan. Sedangkan tugas dan fungsi bawahan adalah menyelenggarakan pembukuan, menyusun keuangan dan penyimpanan uang.

Tata cara memilih anggota pengurus LKMD, kecuali ketua umum, dilaksanakan khusus dan dipimpin oleh kepala desa/lurah untuk mendapatkan keputusan dan selanjutnya melalui camat yang disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk mendapat pengesahan. Masa bakti pengurus LKMD ditetapkan lima tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa baktinya. Pengurus LKMD terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kelurahan tersebut. Para anggota pengurus dinyatakan memenuhi syarat seperti tidak terlibat G. 30 S. PKI, beriman, jujur dan sebagainya.

Anggota LKMD tersebut menganut sistem pasif yaitu bahwa seluruh warga kelurahan menjadi anggota LKMD, sebagai anggota biasa. Disamping itu dikenal juga anggota luar biasa, yaitu orang-orang yang bukan penduduk desa/kelurahan itu tersebut tetapi mempunyai kepentingan dalam desa/kelurahan itu.

Tata kerja LKMD bahwa yaitu lembaga ini mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah dalam melaksanakan dan merencanakan pembangunan musyawarah desa LMD juga merupakan unsur pembantu bagi LKMD dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sedang hubungan

kerja LKMD dengan organisasi lainnya yaitu berifat hubungan kerjasama, saling tukar menukar pengalaman dan semacamnya.

Organisasi LKMD memerlukan suatu pengaturan yang rapih terhadap orang-orang yang bekerjasama dalam suatu wadah tertentu maka organisasi dikatakan adalah organisasi sebagai wadah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Para pengurus diatur secara jelas batas-batas setiap pengurus, sehingga jelas hubungannya, wewenang dan tanggung jawab dalam usaha meencapai tujuan yang akan di capai.
- b. Sebagai tempat orang bekerjasama kegiatan-kegiatan merencanakan untuk melakukan pembangunan desa/ kelurahan.
- c. LKMD bukan sebagai tujuan, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sukamaju, dimana menunjukkan bahwa jumlah seluruh pengurus lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah berjumlah 50 orang, yang terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, pemerintah desa, unsur wanita dan unsur pemuda. Dan LKMD ini memiliki konolidasi organisasi yang baik, dimana ketua umum dan ketua I dan ketua II memiliki kemaampuan yang cukup mengendalikan organisasinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi LKMD sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Desa.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di wilayah pedesaan adalah berkedudukan sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan desa bertujuan untuk membantu pemerintah desa/kelurahan untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan desa.

Keberadaan LKMD ini adalah merupakan peningkatan fungsi dari Lembaga Sosial Desa (LDS). LKMD hanya berkedudukan di desa dan merupakan partner pemerintah desa, dan bukan merupakan unsur pemerintah desa sebagaimana LKMD misalnya. Jadi LKMD hanya merupakan bagian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, seperti merangsang ketertiban masyarakat untuk mendukung pembangunan.

Kehadiran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di wilayah Pedesaan, membawa konsekwensi yang harus menjadi tanggung jawab pengurus karena apabila keberadaan LKMD ini hanya bersifat pasif saja, dalam arti tidak memberikan kontribusi bagi usaha-usaha pembangunan secara nyata, maka sudah barang tentu akan mengundang sikap sikap masyarakat untuk tidak dapat

memberikan dukungan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa.

Salah satu fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dari 9 fungsi yang ada adalah fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

1. LKMD sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), wadah yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di pedesaan, berfungsi untuk membantu kepala desa/lurah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, yang didasarkan atas asas musyawarah dan kegotong royongan. Untuk itu sebagai LKMD wadah pemersatu partisipasi masyarakat, harus tampil sebagai motor penggerak pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan, masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menghimpun pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada ditingkat desa/kelurahan pemuka-pemuka dari golongan agama dan adat, generasi muda yang terdiri dari pemuda, pelajar dan mahasiswa serta cendekiawan yang berdomisili di desa/kelurahan yang bersangkutan, dan tokoh-tokoh kaum wanita dan sebagainya, kesemuanya itu dipersatukan dalam LKMD untuk merumuskan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, yang didasarkan atas asas musyawarah.

Keterlibatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa, berarti juga keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam menyusun program-program pembangunan desa. Sebab LKMD merupakan perwujudan dari lembaga kemasyarakatan yang dapat menghimpun kegiatan-kegiatan dan aspirasi masyarakat desa.

Tidak dapat diingkari bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyusun atau penetapan program pembangunan desa adalah merupakan suatu kebutuhan, karena apalagi dalam erat peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan desa, melalui wadah lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah meliputi sebagai berikut :

a. Pertemuan-pertemuan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Pertemuan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), melalui rapat-rapat desa yang diprakarsai oleh LKMD dalam rangka membicarakan proses pengelolaan pembangunan desa. Dalam pertemuan ini tidak semuanya masyarakat harus hadir, akah tetapi tentu beberapa diantaranya memiliki kepontensi

untuk mewakili aspirasi masyarakat. Atau dapat juga masyarakat mengirim surat data dan informasi mengenai faktor-faktor yang dirasakan untuk ikut didalam pembangunan desa.

b. Diskusi Unit-unit Pembangunan Desa

Diskusi unit-unit pembangunan desa, yaitu pembicaraan yang menyangkut pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan unsur departemen dan non departemen yang ada didesa. Keterlibatan masyarakat tentu adalah penting artinya, terutama melalui wadah LKMD.

Diskusi unit-unit pembangunan desa adalah merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan keterlibatan berbagai komponen bagi pelaksanaan pembangunan desa.

c. Memberikan saran-saran dan kritik

Hal ini juga penting artinya bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah dengan memberikan saran-saran dan kritikan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Seperti memberikan koreksi atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pembagian distribusi air irigasi dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya koreksi-koreksi yang diberikan tersebut tentu memberikan kontribusi bagi adanya penyempurnaan-penyempurnaan program-program pembangunan desa.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, maka telah diadakan penelitian terhadap 84 orang responden melalui suatu wawancara yaitu menggunakan pedoman wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah LKMD dapat berfungsi atau melaksanakan fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa.

a. Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik

Rencana kegiatan pembangunan fisik ini adalah meliputi rencana perbaikan sarana dan prasarana sosial yang dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan sosioekonomi masyarakat, diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan jalan dan jembatan yang dapat menghilangkan isolasi wilayah yang sulit dijangkau serta dapat memudahkan pemasaran hasil produksi dengan harga yang layak, terutama hasil-hasil tambak, dan hasil pertanian lainnya.
- 2) Pembangunan prasarana yang dapat menunjang peningkatan produksi padi, hasil tambak yang disertai usaha pembangunan pengairan yang dapat mengairkan air dari sungai menuju sawah dan tambak.

- 3) Mengusahakan pembangunan prasarana kesehatan terutama air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman dan penciptaan rumah yang layak huni.
- 4) Mengusahakan perluasan jangkauan listrik masuk desa dan dapatnya masyarakat menikmati siaran televisi dengan baik.
- 5) Membantu memperbaiki sarana pendidikan dan mengusahakan adanya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

b. Rencana Pembangunan Non Fisik

Rencana pembangunan non fisik, merupakan kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) beserta pemerintah desa yang dilakukan berupa rencana pembinaan, penyuluhan, pendidikan dan lain-lain.

Adapun rencana pembangunan non fisik yang dimaksudkan adalah :

1. Pembinaan mental keagamaan yang dilakukan pada setiap masjid, terutama pada hari Jum'at.
2. Pembinaan untuk menanamkan pengertian P-4 kepada masyarakat, dilakukan kegiatan-kegiatan simulasi P-4 antara desa/kelurahan pada setiap bulan minggu pertama di Balai LKMD.
3. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat diadakan perondaan setiap malam secara bergilir, disetiap pos siskamling RW dalam desa..

4. Pembinaan pendidikan informal paket-paket "A" dilakukan disanggar Kegiatan Belajar Desa Kajuara di atur sesuai dengan jadwalnya.
5. Pembinaan lingkungan hidup pedesaan, dilakukan penerangan kebersihan dan kehidupan desa setiap RK dan RW dalam desa.
6. Pendayagunaan potensi alam dilakukan melalui kegiatan-kegiatan bakti menggali dan membersihkan saluran irigasi pada areal persawahan dan tambak.
7. Pembinaan perekonomian desa dan koperasi dilakukan dikoperasi unit desa.
8. Pembinaan penyuluhan kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, dilaksanakan di setiap poyandu dalam lingkungan desa.
9. Pembinaan pemuda, wanita olah raga dan kesenian, dilakukan di Balai LKMD dan tempat-tempat lainnya yang ditentukan kemudian.
10. Pembinaan kesejahteraan sosial, dilaksanakan di Balai Pertemuan PKK di Kecamatan dan Desa.

Dalam penetapan rencana-rencana kegiatan pembangunan tersebut di atas, baik fisik maupun non fisik adalah didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi yang merupakan hasil pemantauan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Selanjutnya juga diteliti tentang bagaimana kemampuan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, sehingga rencana-rencana yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat itu sendiri secara keseluruhan, yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan pembangunan sebagai manifestasi dari dinamika desa itu sendiri.

Tabel 3

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEMAMPUAN LKMD MENGATIFKAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat aktif	9	10,71
2.	Cukup aktif	28	33,33
3.	Kurang aktif	42	50,00
4.	Tidak aktif	5	5,95
Jumlah		84	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 1993

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 orang responden atau 10,71% yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat aktif, berikutnya yang mengutarakan bahwa cukup aktif adalah sebanyak 28 orang responden atau 33,33% dan yang menyatakan kurang aktif adalah sebanyak 42 orang responden atau 50,00 yang merupakan

suara mayoritas rasa tanggapan responden terhadap kemampuan LKMD Kecamatan Sukamaju mengaktifkan masyarakat dalam pembangunan dan bahkan ada 5 orang responden atau 5,95% mengomentasi bahwa masyarakat tidak aktif.

Dengan melihat kenyataan di atas berarti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kecamatan Sukamaju perlu bekerja keras untuk mengoreksi diri dan kemudian mengantisipasi sedini mungkin atas kelemahan yang terdapat pada tubuh Lembaga tersebut. Dikala hal ini tidak ditangani secara serius, maka hal serupa kemungkinan akan terulang lagi dan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan lebih fatal lagi ketimbang kegagalan terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh LKMD di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, dimulai pada setiap akan dimulai Bulan Bakti LKMD yang dilaksanakan pada bulan Maret setiap Tahunnya. Dan menurut data yang diperoleh penyusun rencana-rencana pembangunan desa oleh LKMD dilakukan melalui tahapan :

- a. Observasi, yaitu dilakukan penelitian terhadap kepentingan-kepentingan apa yang akan menjadi sasaran kegiatan pembangunan desa yang dianggap mendesak. Biasanya membutuhkan informasi dan

kerjasama masyarakat dalam menyediakan data yang diperlukan.

- b. Pembahasan tahap pertama membicarakan tentang hal-hal yang menjadi temua dalam observasi yang dapat dijadikan sebagai bahan penyusun rencana dan dilakukan diskusi-diskusi yang juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa serta menerima keritikan dan saran-saran dari masyarakat.
- c. Penyusunan dan penetapan program-program yang telah disepakati. Dalam tahap ini berbagai komponen yang terlibat dari instansi pemerintah yang ada di desa, organisasi-organisasi pemuda, seperti karang taruna dan lain-lain.
- d. Tahap selanjutnya rencana yang telah disusun dan diterapkan tersebut dikirim pada tingkat Kecamatan untuk dibahas pada tingkat Kecamatan beserta program dari desa lainnya, dan seterusnya dikirim pada tingkat Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

Dalam proses tersebut di atas yang diterapkan pemerintah desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu telah mendapat perhatian dan dukungan secara positif dari masyarakat.

2. LKMD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam mengelola pembangunan desa, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah dapat berfungsi dengan baik untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

Bentuk-bentuk partisipasi yang digalakkan masyarakat Desa di Kecamatan Sukamaju adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga

Masyarakat Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Desa Tingkat II Luwu yang merupakan ciri masyarakat tradisional yang sementara dalam peralihan atau masyarakat yang sudah mempergunakan alat-alat modern dalam kehidupan sehari-harinya, ternyata masih cukup kuat mempertahankan sistem gotong-royongan yang ada dalam masyarakat seperti dalam pengelolaan pembangunan desa.

Tentang faktor ini maka diadakan wawancara terhadap responden, mengenai bagaimana LKMD

menggerakkan tenaga-tenaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan fisik, terutama yang menyangkut pembangunan swadaya masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LKMD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat berfungsi	13	15,48
2.	Cukup berfungsi	37	44,05
3.	Kurang berfungsi	34	40,48
Jumlah		84	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 1997

Hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 13 orang atau 15,49% yang mengatakan LKMD sangat berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dan 37 orang atau 44,05% mengatakan cukup berfungsi, dan 34 orang atau 40,48% yang mengatakan kurang berfungsi dan tidak berfungsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menurut responden adalah cukup berfungsi, tetapi tidak berarti Kecamatan Sukamaju secara aktif

melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, karena masih ada responden yang menyatakan kurang berfungsi. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa yang dapat dibagi atas dua kegiatan, sebagaimana uraian berikut ini.

Tabel 5

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEMAMPUAN LKMD
MENGGERAKAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat memuaskan	14	16,67
2.	Cukup memuaskan	39	46,43
3.	Kurang memuaskan	27	32,14
4.	Tidak memuaskan	4	4,76
Jumlah		84	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 1993

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 14 orang atau 16,67 % yang mengatakan kemampuan LKMD Kecamatan Sukamaju dalam menggerakkan partisipasi tenaga masyarakat adalah sangat memuaskan, dan 39 orang atau 46,43% yang mengatakan cukup memuaskan, selanjutnya 27 orang atau 32,14% yang mengatakan kurang memuaskan, dan 4 orang atau 4,76 % yang mengatakan tidak memuaskan. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa menurut responden kemampuan LKMD dalam menggerakkan partisipasi tenaga masyarakat dalam cukup memuaskan. Dalam artian bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa cukup aktif untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Dana

Akibat pergeseran kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, maka sejalan dengan tingkat kemampuan masyarakat untuk memberikan sebagian hasil pendapatannya dalam pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

Memang harus diakui bahwa tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Desa untuk pembangunan, maka sudah jelas sangat mengurangi kelancaran pembangunan. Untuk itu partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka pembiayaan pembangunan Desa adalah sangat penting artinya.

Dalam hubungan ini, maka diadakan wawancara terhadap responden tentang bagaimana fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat sebagai manipesta di partisipasi masyarakat melalui pembiayaan dalam upaya pembangunan Desa. Tabel berikut dapat dijelaskan mengenai fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menggerakkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Tabel 6

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP FUNGSI LKMD MENGGERAKAN
MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat memuaskan	22	26,19
2.	Cukup memuaskan	41	48,81
3.	Kurang memuaskan	14	16,67
4.	Tidak memuaskan	7	8,33
Jumlah		84	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 1993

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada 22 orang responden atau 26,19 % yang mengemukakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kecamatan Sukamaju sangat memuaskan dalam menggerakkan masyarakat atas pembiayaan pembangun Desa, sedangkan mengutarakan cukup memuaskan sebanyak 41 orang responden atau 48,81 % dan yang berpendapat kurang memuaskan sebanyak 14 orang responden atau 16,67 % dan ada pula yang berpendapat tidak memuaskan sebanyak 7 orang responden atau 8,33 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dapat melaksanakan fungsinya dalam menggerakkan masyarakat

atas pembiayaan pembangunan Desa. Hal ini terbukti dengan adanya responden sebanyak 63 orang atau 75,00 % menyatakan memuaskan implementasi fungsi lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atas pemberian motivasi kepada masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Desa ketimbang yang berpendapat kurang/tidak memuaskan dengan frekuensi jawaban 21 orang responden atau 25,00 %.

Adapun hasil pembangunan yang melibatkan partisipasi swadaya masyarakat Desa dalam wilayah Kecamatan Sukamaju antara lain :

1. Hasil pembangunan fisik

Pembangunan fisik dalam berbagai Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7

HASIL PEMBANGUNAN FISIK YANG MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan Proyek	Sumber Dana		Tenaga Masyarakat dilibatkan
		Pemerintah	Swadaya Masyarakat	
1.	Rehabilitas Kantor Desa 3 buah	Rp.4.500.000	Rp.1.000.000	90
2.	Rehabilitasi 3 buah buah masjid	Rp.3.000.000	Rp.4.500.000	1.450
3.	Pembangunan Pos Kamling 3 buah	Rp. 900.000	Rp.3.500.000	75
4.	Pengadaan Dekker 6 buah	Rp. -	Rp.2.500.000	87
5.	Pembuatan tugu batas Desa 3 buah	Rp.1.050.000	Rp.4.750.000	125
6.	Perbaikan irigasi 3.500 meter	Rp. 50.000	Rp. 750.000	175
7.	Pembuatan Bendungan 2 buah	Rp.1.500.000	Rp. 900.000	83
Jumlah		Rp.11.450.000	Rp.17.850.000	2.085 org

Sumber : Hasil Laporan LKMD Kecamatan Sukamaju, 1993

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak bahwa dana bantuan pemerintah sebesar Rp.11.450.000 (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan swadaya masyarakat sebanyak Rp.17.850.000 (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai sumbangan tenaga masyarakat sebanyak Rp.12.510.000 (Dua belas juta lima ratus

sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil perkalian 2.085 orang masyarakat kali rata-rata 3 hari kerja kali gaji minimum sebanyak Rp.2.000 (Dua ribu rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik termasuk tinggi.

2. Pembangunan Non Fisik

Hasil pembangunan fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat Desa di Kecamatan Sukamaju yang dikordinir oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah meliputi sebagai berikut :

Tabel 8

HASIL KEGIATAN LKMD BERUPA PEMBANGUNAN NON FISIK
YANG MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Peserta
1.	Pembinaan bidang idiologi (P-4)	12 kali	1.200 org
2.	Pembinaan Kamtibmas	10 kali	145 org
3.	Pembinaan Ekonomi	20 kali	125 org
4.	Pembinaan Sosial Budaya	10 kali	145 org
	a. Bidang Keagamaan	75 kali	1.275 org
	b. Pendidikan dan Penerangan	50 kali	850 org
	c. Kesehatan Sosial	35 kali	745 org
	d. Kesehatan Kependudukan	25 kali	155 org
	e. Lingkungan Hidup	14 kali	245 org
	f. Peranan Pemuda-perudi	25 kali	250 org
	dalam Pembangunan		
Jumlah		266 kali	4.990 org

Sumber : Hasil Laporan LKMD Kecamatan Sukamaju, 1993

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Non Fisik, ternyata telah berhasil dilaksanakan 266 kali kegiatan dari 4 (empat) pokok kegiatan dan didukung dari masyarakat Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Sukamaju sebanyak 4.900 orang sebagai obyek dan sumber kegiatan. Hemat peneliti bahwa partisipasi masyarakat desa dan kepedulian pemerintah Kecamatan Sukamaju terhadap pembangunan non fisik cukup tinggi.

B. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Pembinaan dan Menggerakkan Potensi Pemuda untuk Pembangunan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah diharapkan untuk mampu mengelola kegiatan-kegiatan pembangunan Desa dalam berbagai sektor kegiatan. Dan salah diantaranya juga merupakan salah satu fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun hal ini merupakan fungsi I dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Kemampuan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun Desa dapat dilihat dari beberapa sub variabel, yaitu :

1. Keterlibatan Pemuda Dalam Kepengurusán LKMD

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Kecamatan Sukamaju 50 % diantaranya masih tergolong pemuda, dimana mereka rata-rata berumur 40 tahun kebawah, hal ini tentu disebabkan Ketua Umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam hal ini Kepala Desa, mereka pun tergolong cukup muda, sehingga jiwa muda yang dimiliki masih dicerminkan dalam pengelolaan LKMD. Melihat di kecamatan Sukamaju Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, memiliki keterlibatan yang cukup dalam kegiatan LKMD.

2. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan LKMD

Dukungan pemuda dalam setiap kegiatan LKMD adalah tentu sangat penting artinya mengingat bahwa para pemuda merupakan asset yang potensial dalam pengelolaan pembangunan.

Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan LKMD yang banyak melibatkan pemuda dalam pengelolaan pembangunan desa, antara lain.

a. Pembinaan karang taruna

Organisasi pemuda karang taruna adalah merupakan wadah generasi muda yang dibina langsung oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dalam kegiatan ini lebih banyak berkonsentrasi

pada kegiatan-kegiatan kepemudaan, seperti :

- Latihan keterampilan pemuda desa
- Latihan kader wanita desa
- Latihan olah raga
- Pembinaan seni dan budaya

b. Kegiatan organisasi remaja yang ada adalah sebanyak 5 buah yang statusnya hanya untuk skop desa dan kecamatan yang dipantau langsung oleh pengurus LKMD, sehingga kegiatannya diarahkan pada hal-hal positif yang menunjang kegiatan LKMD.

c. Kegiatan pemuda yang membantu pemerintah desa.

Berbagai kegiatan pemerintah desa yang tidak dapat dilaksanakan keseluruhan oleh aparat-aparat pemerintah desa, sehingga mereka perlu melibatkan pemuda desa.

Keterlibatan pemuda desa, berdasarkan hasil wawancara dengan responden adalah meliputi :

- Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana sejumlah pemuda desa ditugaskan untuk membantu pemerintah desa mengadakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- Pencatatan daftar kepala keluarga dan kartu keluarga kepada penduduk desa.
- Membantu pemerintah desa dalam pengumpulan data-data mengenai kekayaan desa.

- Membantu kegiatan pemerintah desa menjelang perayaan hari-hari besar nasional.
- Membantu pemerintah desa dalam mempersiapkan kegiatan pemilihan umum dan pemilihan desa.
- Ikut terlibat sebagai Kader Pembangunan Desa (KPD).

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, adalah sangat membutuhkan bantuan dari para pemuda desa. Hal ini menunjukkan betapa besar peranan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Tentang bagaimana pelaksanaan LKMD dalam membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam membangun maka telah diadakan wawancara terhadap responden, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 9

TANGGAPAN TERHADAP FUNGSI LKMD DALAM MEMBINA DAN MENGERAKKAN POTENSI PEMUDA DALAM MEMBANGUN

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat memuaskan	12	17,86
2.	Cukup memuaskan	23	27,38
3.	Kurang memuaskan	27	32,14
4.	Tidak memuaskan	19	22,62
Jumlah		84	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 1992

Dari hasil tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 12 orang responden atau 17,86 % yang mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi LKMD dalam membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan adalah sangat memuaskan, dan 23 orang responden atau 27,38 % yang mengatakan cukup memuaskan selanjutnya klasifikasi yang mengemukakan bahwa kurang memuaskan dengan frekuensi jawaban adalah 27 orang responden atau 32,14 sedangkan jawaban lain adalah tidak memuaskan dengan frekuensi jawaban adalah 19 orang responden atau 22,62 %.

Dengan melihat perbandingan antara jawaban memuaskan frekuensi 35 orang responden atau 45,24% dengan yang menjawab kurang/tidak memuaskan frekuensi 48 orang responden atau 54,76 %, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga ketahanan masyarakat desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten daerah tingkat II Luwu, gagal melaksanakan fungsinya dalam pembinaan dan penggerakkan potensi pemuda-pemudi dalam pembangunan desa.

Tabel 10

HASIL KEGIATAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
DALAM USAHA MEMBINA POTENSI PEMUDA-PEMUDI
UNTUK MEMBANGUN

No.	Jenis Kegiatan Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah yang Terlibat
1.	Latihan Dasar Kepemimpinan	2 kali	240 org.
2.	Latihan Keterampilan Pemuda-Pemudi	6 kali	75 org.
3.	Latihan Kader Pembangunan	4 kali	20 org.
4.	Pembinaan Olah Raga	10 kali	100 org.
5.	Pelatihan Sensus Penduduk	1 kali	20 org.
6.	Pelatihan Wiraswasta dan usaha kecil	2 kali	10 org.
Jumlah		25 kali	235 org.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 6 jenis kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selama tahun 1993 yang diarahkan untuk membina dan menggerakkan potensi pemuda-pemudi Desa untuk membangun dengan kegiatan sebanyak 25 kali, dan melibatkan pemuda-pemudi sebanyak 235 orang dari jumlah perkiraan 7.980 orang pemuda-pemudi yang sempat dibina lewat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan demikian, maka konklusifnya adalah fungsi LKMD di bidang tersebut, masih jauh dari kesempurnaan.

C. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat

Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan fungsi LKMD adalah faktor yang dapat memperlancar dan menghalangi pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai wadah pembinaan dan penggerakkan potensi pemuda untuk membangun.

1. Faktor yang dapat mendorong pelaksanaan fungsi LKMD dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta wadah pembinaan dalam menggerakkan potensi pemuda dalam membangun, antara lain meliputi adanya tingkat keterampilan dan kecakapan para pengurus LKMD yang terdiri atas para pemuda dan tokoh masyarakat, sehingga mampu untuk melaksanakan pendekatan yang baik dalam menggalang seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya kegiatan-kegiatan LKMD yang cukup realistis dalam mendukung pembangunan desa. Adanya sikap masyarakat yang cukup patuh terhadap ajakan dan perintah dari pemuka masyarakatnya.

Berikut ini dikemukakan pendapat responden yang menjadi pendorong pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta wadah membina potensi pemuda untuk membangun.

Tabel 11 : Pendapat responden terhadap faktor-faktor pendorong pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan sebagai wadah membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun.

Jawaban responden	Frekuensi		
	a	b	c
a. Adanya keterampilan dan kecakapan pengurus LKMD	45	35	4
b. Adanya kegiatan LKMD yang realistis	50	27	7
c. Sikap persuasif pengurus LKMD	60	24	-
d. Adanya tingkat kesadaran masyarakat desa Kecamatan Sukamaju terhadap pelaksanaan pembangunan desa.	43	41	-

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 1993

Keterangan :

a = Sangat memuaskan b = Cukup memuaskan c = Kurang memuaskan

2. Faktor-faktor penghambat

Faktor-faktor yang dapat menghambat menurut penelitian dan menurut pendapat responden adalah meliputi seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 12 : Pendapat responden terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam peranan pembangunan desa sebagai wadah membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun.

Jawaban responden	Frekuensi		
	a	b	c
a. Masih adanya sebagian masyarakat yang berfikir tradisional	31	21	32
b. Adanya keterbatasan dana dimiliki oleh LKMD Desa Kecamatan Sukamahi	71	13	-
c. Adanya sikap masyarakat/ pemuda yang hanya mau berhura-hura saja	21	46	17
d. Banyaknya Pemuda-pemuda desa yang meninggalkan desanya.	30	32	22

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 1993

Keterangan :

a = Tinggi

b = Cukup Tinggi

c = Kurang

Dengan demikian bahwa menurut hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan sebagai wadah membina generasi muda untuk membangun adalah meliputi :

1. Faktor pendukung :

- Adanya keterampilan dan kecakapan pengurus LKMD yang sangat memuaskan.
- Adanya kegiatan LKMD yang realistis dan sangat memuaskan.
- Adanya tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Suakamaju terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

2. Faktor Penghambat

- Masih adanya sebagian masyarakat yang berpikir tradisional.
- Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh LKMD
- Adanya sikap masyarakat/pemuda yang hanya mau berhura-hura.
- Banyaknya pemuda-pemudi desa yang meninggalkan desanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini penulis akan mengemukakan kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksana fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Kecamatan Sukamaju ternyata telah dapat dilakukan dengan baik, hal ini dapat ditandai dengan terlibatnya masyarakat secara aktif memberikan dukungan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, seperti melalui pertemuan-pertemuan LKMD, keritik dan saran-saran, serta dalam kegiatan proyek pembangunan desa baik fisik maupun non fisik.
2. Pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan, adalah ternyata kurang memuaskan, dimana bahwa hampir seluruh dari pengurus-pengurus LKMD terdiri dari kaum muda yang merupakan sumber daya yang cukup potensial. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan LKMD sebagai partner pemerintah desa, membantu dalam memungut pajak bumi dan bangunan, mengadakan sensus penduduk, pengurus kartu keluarga, menjadi kader pembangunan desa, dan lain-lain sebagainya.

3. Faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelaksanaan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah meliputi : adanya tingkat ketrampilan masyarakat desa yang sudah memadai, terutama pengurus LKMD, adanya sikap masyarakat yang cukup patuh terhadap ajakan-ajakan untuk berpartisipasi, kegiatan-kegiatan LKMD cukup realistik, sehingga dapat tanggapan yang positif dari masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah : masih adanya segelintir masyarakat yang berfikir tradisional, sehingga mereka cenderung tertutup pada perubahan, adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh LKMD. Faktor-faktor ini juga berlaku bagi upaya menggerakkan, dan membina dan mengelola potensi pemuda untuk membangun melalui wadah LKMD.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para pengurus LKMD lebih mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan contoh-contoh, atau panutan kepada masyarakat bagaimana mereka terlibat dengan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Dalam melaksanakan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat, hendaknya disesuaikan dengan aktifitas penduduk, misalnya bila musim tanam bagi petani hendaknya tidak dilakukan kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat desa.

3. Perlu semakin meningkat kemampuan dan ketrampilan pemuda desa, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Berta, Inyoman, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Djojohadikusumo, Sumitro, Indonesia Dalam Pembangunan Masa Kini dan Masa Depan, LP3ES, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1976
- Kartohadikusomo, Utardjo, Desa, Sumur Bandung, 1965.
- Koestraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia, Yayasan Penerbit Fak. Ekonomi, U.I Jakarta, 1964.
- Marbun, B.N. Proses Pembangunan Menyongsong Tahun 2000 Erlangga, 1973.
- Mira Atmaja, Sukandar, Pokok-pokok sosiologi Pedesaan CV. Jasa Guna, Jakarta, 1973.
- Michael P. Todaro, Beberapa aspek Pembangunan Nasional dan Daerah, Galia Indonesia, Jakarta 1983.
- Siagian, S.P. Sistim Informasi Dalam Mengambil Keputusan Gunung Agung, Jakarta, 1973.
- _____, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1976.
- _____, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Simonrangkir, J.C.T. Tentang Sekitar Undang-undang Dasar 1945.
- Slamet Ina, Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa Barata, Jakarta, 1973.
- Soeparno, R, Mengenal Desa dan Pengelolaannya, Intermasa, Jakarta, 1975.
- Suryaningrat, Bayu, Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Angkasa Baru, Jakarta, 1985.
- Suwingjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber* Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

B. DOKUMEN-DOKUMEN

Keputusan Presiden R.I. No. 28 Tahun 1980, Tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi PSD Menjadi LKMD.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa di Indonesia.

